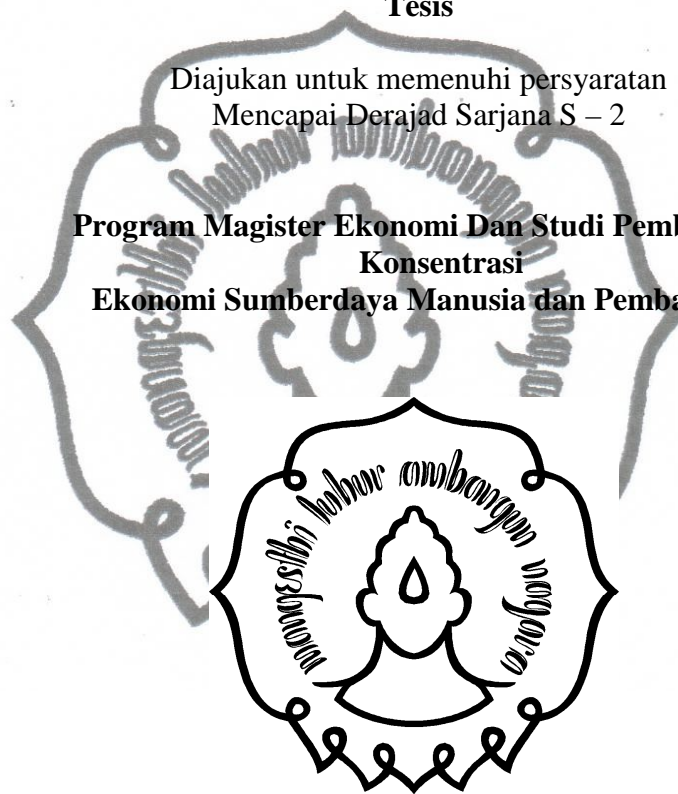


**ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN PELATIHAN, MODAL
USAHA SERTA ACARA-CARA MENGOLAH USAHA TERADAP
PENDAPATAN ANGGOTA P2M-BG DI KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN**

Tesis

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S – 2

**Program Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi
Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**



Disusun oleh

**Wahyu Widayati
S.3208032**

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to **2010**

Halaman Persetujuan

**ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN PELATIHAN, MODAL USAHA
SERTA CARA – CARA MENGOLAH USAHA TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG)
DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN**

Diajukan oleh:

WAHYU WIDAYATI

S.3208032

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada tanggal : _____

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek
NIP. 19550801 198103 1 006

Drs. Sri Mulyono, M.Si.
NIP. 130803770

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dr. J.J. Sarungu. MS
NIP. 19510701 198010 1 001

commit to user

**ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN PELATIHAN, MODAL USAHA
SERTA CARA – CARA MENGOLAH USAHA TERHADAP
PENDAPATAN ANGGOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG)
DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN**

**Disusun Oleh :
WAHYU WIDAYATI**

S.3208032

Telah disetujui dan di sahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal : _____

Jabatan

Nama

Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji

Dr. JJ. Sarungu, MS

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek

Pembimbing Pendamping

Drs. Sri Mulyono, M.Si

Mengetahui,

Direktur PPs UNS

Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan
Studi Dan Pembangunan

Prof. Drs. Suranto. M.Sc., Phd.

Dr. J.J. Sarungu. MS

NIP. 195708201985031004

NIP. 19510701 198010 1 001

INTISARI

WAHYU WIDAYATI

ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN PELATIHAN, MODAL USAHA SERTA CARA – CARA MENGOLAH USAHA TERHADAP PENDAPATAN ANGGOTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) DI KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan, bantuan modal dan cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen secara parsial maupun secara simultan.

Populasi penelitian adalah kepala keluarga di Desa Karangtalun Kecamatan Tanon berjumlah 817 KK. Sampel penelitian ini sejumlah 60 responden dari 10 kelompok (masing – masing kelompok terdiri dari 6 anggota) rumah tangga yang diambil secara acak sederhana dengan menggunakan teknik *proposive random sampling*. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian pelatihan, bantuan modal usaha dan cara – cara mengolah usaha secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Kata Kunci :

Pelatihan, modal usaha, cara-cara mengolah usaha, pendapatan anggota P2M-BG, dan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen,

ABSTRAK

WAHYU WIDAYATI

ANALYSIS EFFECT OF TRAINING, BUSINESS CAPITAL AND BUSINESS MANAGEMENT TO MEMBERS INCOME OF PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2M-BG) IN SRAGEN TANON SUB DISTRICT

The aim this study to the effect determine of training, bussinus capital and bussinus management to the income members of program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender (P2M-BG) in sragen tanon sub district.

The study population was the head of the family in the village numbered 817 KK Karangtalun Tanon Subdistrict. The sample of 60 respondents from 10 groups (each - each group consists of 6 members) households were randomly drawn simply by using purposive random sampling technique. Testing hypotheses using multiple linear regression.

The results showed the provision of training, bussinus capital and bussinus management partially or simultaneously affect the income members of program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender (P2M-BG) in sragen tanon sub district.

Keywords:

Training, business capital, business management, revenue members of P2M-BG, and District Sragen , Sub district Tanon.

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : WAHYU WIDAYATI
NIM : S.3208032
Program Studi : Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Minat Utama : **Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam tesis ini dan disebutkan sebagai Daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Surakarta,

Tertanda,

Wahyu Widayati
S.3208032

MOTTO

Karena manusia cinta akan dirinya, tersembunyilah baginya aib dirinya; tidak kelihatan olehnya walaupun nyata. Kecil di pandangnya walaupun bagaimana besarnya.

- Jalinus At Thabib

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu.

- Marcus Aurelius

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada di atas kepala orang lain.

- Thomas Hardy

Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak.

- Benjamin Franklin

PERSEMBAHAN

Kesabaran untuk karya kecil ini ku persembahkan untuk:

1. Buat Ibu dan kedua mertua saya yang telah memotivasi saya.
2. Suami dan anak-anakku tersayang
3. Teman-teman dikantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sragen.
4. Teman-teman Almamaterku Magister Studi Ekonomi dan Pembangunan.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Pemurah atas rahmat dan anugerah yang penulis rasakan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : Analisis Usaha Pengaruh Pemberian Pelatihan, Modal Usaha serta cara-cara mengolah usaha terhadap Pendapatan Anggota Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG) di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, terlebih kebatasan penulis dalam wawasan dan pengalaman terkait obyek yang diteliti. Namun demikian harapan kami semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dalam penyusunan Tesis ini berbagai kendala dihadapi penulis, namun demikian rasanya menjadi ringan ketika ketulusan-ketulusan hadir dari berbagai pihak yang mengulurkan bantuan kepada penulis. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. JJ. Sarungu, MS selaku Direktur Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret beserta Staf Pengelola.
2. Prof. Dr. Tulus Haryono, M.Ek selaku Pembimbing I yang memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
3. Drs. Sri Mulyono, M.Si selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa memberi dorongan serta meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
4. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sragen.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Karyawan dan Karyawati Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Suami tercinta yang telah menyemangati, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk penulis.
8. Anak-anakku yang mendukung doa.
9. Teman-teman almamater.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, yang telah membantu keberhasilan penyusunan Tesis ini.

Surakarta, Oktober 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
INTISARI	vi
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Pengembangan Masyarakat	7
2. Pemberdayaan Masyarakat	12
3. Kemiskinan	19
4. Masalah Kemiskinan	23
5. Strategi Pengintegrasian Keadilan Gender	25
6. Penggunaan Analisis Gender	25
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Hipotesis	32

BAB III : METODE PENELITIAN	35
A. Populasi Dan Sampel	35
B. Metode Analisis	36
C. Definisi Operasional	40
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. Pelaksanaan Program P2MBG	44
1. Penyusunan Data Dasar	44
2. Rencana Program Dan Kegiatan	45
3. Kegiatan Yang Telah dilaksanakan	46
4. Fasilitas/Bantuan Yang Diterima	47
5. Swadaya Masyarakat	48
6. Tata Cara Pelaksanaan Program P2GMB	48
B. Deskripsi Responden	53
C. Deskripsi Jawaban Responden	58
D. Analisis Data	59
E. Pembahasan	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran Manajerial	72
C. Saran Penelitian Kedepan	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah sekarang, kemiskinan dan ketimpangan struktur sosial, yaitu perbedaan status sosial antara lapisan masyarakat atas dengan lapisan masyarakat bawah masih merupakan masalah masyarakat. Orientasi pembangunan masyarakat menempatkan permasalahan masyarakat tersebut sebagai upaya/usaha pengembangan masyarakat itu sendiri. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat seutuhnya dan masyarakat keseluruhan tersebut, menempatkan pihak pemerintah hanya berfungsi memfasilitasi tercapainya lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Fasilitas tersebut bersifat/bertujuan menggali inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal serta memelihara dan menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan berbagai program pengembangan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui berbagai pendekatan partisipatif. Pada era pembangunan masa lalu proses pengembangan masyarakat mulai dari tahap identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program

commit to user

dilakukan oleh pemerintah dengan orientasi pada hasil atau produksi (*production centered development*) tanpa melibatkan masyarakat, orientasi tersebut ternyata telah mengakibatkan kerusakan terhadap sumberdaya alam yang mengancam keberlanjutan pembangunan itu sendiri serta mengabaikan aspek-aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Korompis, 2005:6)

Partisipasi masyarakat desa dapat dikembangkan dengan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi diharapkan secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai lembaga yang ada di desa, terutama yang dapat memwadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan lembaga yang sebaiknya ditetapkan oleh pemerintahan desa. Maksud tersebut diperlukan adanya kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri (*bottom up*), bukan lagi bentukan dari pemerintah (*top down*).

Kemiskinan sangat berpengaruh pada rumah tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selama ini adanya konsep pembagian kerja dan tanggung jawab atas dasar gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada pekerjaan-pekerjaan produktif tanpa upah, padahal mereka mempunyai sumbangan pada usaha ekonomi melalui kerja upahan. Sumbangan pekerjaan mereka baik di sektor rumah tangga maupun pekerjaan upahan tidak

diperhitungkan dalam statistik nasional. Dalam kondisi semakin berkurangnya peranan mereka, maka perempuan menanggung beban lebih berat karena harus mengatasi permasalahan ekonomi rumah tangga untuk dapat terus bertahan hidup (*survive*). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat bagi perempuan yang hidup pada keluarga-keluarga miskin.

Kemiskinan yang disandang perempuan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Jawa tengah berhubungan langsung dan ditandai dengan tidak adanya kemandirian dan peluang-peluang ekonomi, kurangnya akses pada segala sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi, akses kredit, kepemilikan dan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kurangnya akses pada pendidikan formal, pelayanan kesehatan dan pelayanan-pelayanan pendukung lainnya, maupun partisipasi minimal dalam proses pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah-langkah baik oleh pemerintah maupun masyarakat (*stakeholders*) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam yang tersedia pada tingkat lokal, dengan tetap menjaga dan memelihara kelestarian potensi sumberdaya alam tersebut. Hal ini dapat dijadikan model bagi terciptanya pembangunan berbasis kompetensi masyarakat lokal dan model pembangunan berkelanjutan.

Berbagai program pengembangan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah, yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui berbagai pendekatan. Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi ini telah dilakukan diantaranya munculnya beberapa

program pengembangan masyarakat diantaranya JPS, RASKIN, BLT, PHBM dan P2MBG.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan adanya Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG)(pp.no 46 th 2007). P2M-BG adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat secara terpadu, program ini melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan. Dengan demikian fokus program ini adalah peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan.

Kebijakan yang dilakukan menangani kemiskinan tersebut dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat mitra melalui proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis,
- 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat,
- 3) peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap masyarakat,
- 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup,
- 5) peningkatan kesempatan berusaha,
- 6) peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program,

- 7) peningkatan partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan program, dan
- 8) penguatan kelembagaan masyarakat.

Pemda Sragen, (2008)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Apakah pemberian pelatihan, modal usaha dan cara – cara mengolah usaha secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen ?
2. Apakah pemberian pelatihan berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?
3. Apakah pemberian bantuan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?
4. Apakah cara-cara mengolah usaha berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui pengaruh pemberian pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan modal usaha dan cara – cara mengolah usaha secara bersama –

sama terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
3. Untuk mengetahui pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
4. Untuk mengetahui pengaruh cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dapat memberikan pengetahuan tentang cara/usaha meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan (dalam hubungannya dengan distribusi antar rumah tangga) melalui program pemberdayaan masyarakat berperspektif *gender*.
2. Memberikan kontribusi dan pertimbangan bagi pengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan distribusi yang merata antar rumah tangga di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
3. Sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti yang lain untuk permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah suatu aktivitas pembangunan yang berorientasi pada kerakyatan dengan syarat menyentuh aspek-aspek keadilan, keseimbangan sumberdaya alam, partisipasi masyarakat, dan jika memungkinkan berdasarkan prakarsa komunitas (Korten, 1990:235). Selanjutnya Dharmawan (2006:121) mengungkapkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu perubahan yang terencana dan relevan dengan persoalan-persoalan lokal yang dihadapi oleh para anggota komunitas yang dilaksanakan secara khas dengan cara-cara yang sesuai dengan kapasitas, norma, nilai, persepsi dan keyakinan anggota komunitas setempat, dimana prinsip-prinsip *resident participation* dijunjung tinggi.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat meliputi pembangunan terpadu, melawan ketidakberdayaan struktural, Hak azasi manusia (HAM), keberlanjutan, pemberdayaan, kaitan masalah pribadi dan politis, kepemilikan oleh komunitas, kemandirian, ketidaktergantungan pada pemerintah, keterkaitan, tujuan jangka pendek dan visi jangka panjang, pembangunan yang bersifat organik, kecepatan pembangunan, keahlian dari luar, pembangunan komunitas, kaitan proses dan hasil, integritas *commit to user*

proses, tanpa kekerasan, keinklusifan, konsensus, kerjasama, partisipasi, dan perumusan tujuan (Gunardi, Purnaningsih dan Lubis, 2006:12).

Lima karakteristik dari pengembangan masyarakat (*community development*), yaitu :

- 1) Berdasarkan pada kondisi dimana pemerintah menjadi terbuka kepada upaya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tingkat keterlibatan masyarakat yang menggambarkan tingkat keterbukaan, secara efektif diatur oleh pemerintah.
- 2) Aktivitas pengembangan masyarakat dibangun terutama sekitar masalah-masalah sosial, dimana orang dalam masyarakat berhubungan secara mudah. Di lain pihak, melalui manajemen masyarakat, terpadu suatu komponen ekonomi dan atau teknik yang kuat. Meskipun demikian, proyek manajemen masyarakat tetap melaksanakan usaha-usaha yang dapat diidentifikasi secara jelas dalam suatu dasar homogenitas yang terbuka.
- 3) Bercirikan masyarakat lokal yang memiliki keutamaan atau kekuasaan, dapat diidentifikasi secara jelas dan mengandung muatan diri.
- 4) Proses pengembangan masyarakat diarahkan kepada kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat.
- 5) Berpusat pada kegiatan pelatihan yang netral secara politik dan terpisah dari berbagai pertikaian atau debat politik. (Hikmat, 2001:74)

Kegiatan pengembangan masyarakat ini harus mendasarkan pada perspektif *ekologi* dengan prinsip *holistik* (menyeluruh dari segala aspek lingkungan), *sustainability* (kelestarian kegiatan), *diversity* (keanekaragaman), dan *equilibrium* (keseimbangan). Konsekuensi dari perspektif ekologi ini melukiskan bahwa prinsip *holistik* akan mengarahkan pada pemikiran untuk memusatkan pada filosofi lingkungan, menghormati hidup dan alam, menolak solusi yang *linier*, dan perubahan yang terus menerus.

Prinsip *sustainability* akan membawa pada konsekuensi untuk memperhatikan konservasi, mengurangi konsumsi, tidak mementingkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian perkembangan teknologi dan anti kapitalis. Prinsip *diversity* membawa konsekuensi pada penilaian terhadap perbedaan, jawaban atau alternatif yang tidak tunggal, desentralisasi, jaringan kerja dan komunikasi lateral serta penggunaan teknologi tepat guna. Sementara prinsip *equilibrium* akan membawa pada perspektif isu-isu global atau lokal, energi *yin* dan *yang*, *gender*, hak dan pertanggungjawaban, kedamaian dan kooperatif (Ife, 1995 dalam Hikmat, 2001:76).

Selain prinsip ekologi, kegiatan pengembangan masyarakat juga harus mendasarkan pada *social justice* atau keadilan sosial. Keadilan sosial ini mencakup kegiatan-kegiatan yang memperhatikan kelemahan secara struktural (*structural disadvantage*), pemberdayaan (*empowerment*), kebutuhan (*needs*), hak azasi (*human right*), kedamaian dan anti tindak

kekerasan (*peace and non violence*), partisipasi dalam kehidupan demokrasi (*participatory democracy*).

Pembangunan masyarakat berbasis lokal merupakan tindakan kolektif, yang merupakan inti dari gerakan sosial, yang melibatkan sekelompok orang yang dicirikan oleh adanya kerjasama, tujuan yang tegas, serta kesadaran dan kesengajaan. Portes (1998:264) mengatakan sumber modal sosial dapat bersifat :

- 1) *Consummatory*, yaitu nilai-nilai sosial budaya dasar dan solidaritas sosial, dan
- 2) *instrumental*, yaitu pertukaran yang saling menguntungkan dan rasa saling percaya.

Sifat sosial dari modal sosial adalah adanya saling menguntungkan paling sedikit antara dua orang, menunjuk pada hubungan sosial, serta berhubungan dengan kepercayaan, jejaring sosial, hak dan kewajiban.

Pada dasarnya sasaran pembangunan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Masyarakat berdaya memiliki ciri-ciri : (1) mampu memahami diri dan potensinya, (2) mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan berunding, bekerjasama secara saling menguntungkan dengan *bargaining power* yang memadai, (4) bertanggung jawab atas tindakannya
commit to user

sendiri. Di era globalisasi sekarang ini, ciri-ciri masyarakat berdaya dapat dilihat dengan dimilikinya etos kerja yang tinggi, kreatif, peka dan tanggap, inovatif, religius, fleksibel, dan jati diri dengan swakendali (Sumardjo dan Saharuddin, 2006:17).

Paradigma baru pembangunan dewasa ini lebih memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Menurut Holsteiner (1980 dalam Sumardjo dan Saharudin, 2006:17) partisipasi masyarakat diperlukan karena partisipasi berarti : (1) Mensukseskan program secara lebih terjamin dan lebih cepat, (2) Mendekatkan pengertian pihak perencana/ pengelola dengan kebutuhan golongan sasaran, (3) Media untuk memupuk keterampilan masyarakat, kekeluargaan, dan kepercayaan diri, (4) Mencapai partisipasi positif sebagai ciri khas masyarakat modern.

Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif individu anggota masyarakat adalah melalui pendekatan kelompok. Pembangunan yang ditujukan kepada pengembangan masyarakat, akan mudah dipahami apabila melibatkan agen-agen lokal melalui suatu wadah yang dinamakan kelompok. Menurut Sumarti dan Syaukat, (2006:21), dikarenakan dalam melakukan beragam aktivitas pencaharian nafkah, setiap orang cenderung berkelompok.

Berdasarkan pandangan interaksi pembentukan kelompok, setiap orang menyadari adanya ketidak mampuan memenuhi tujuan yang

diinginkan. Dengan ikatan-ikatan yang berhasil dibentuk, kebutuhan-kebutuhan individu akan dapat dipenuhi.

Kegiatan pengembangan masyarakat memandang bahwa keberadaan kelompok pada masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan perubahan kepribadian dan memperkuat pencapaian tujuan. Penggunaan kelompok dimungkinkan terjadi, karena individu-individu anggota masyarakat yang terlibat akan menyesuaikan diri dengan salah satu perilaku kolektif. Jika masyarakat telah dapat menyesuaikan diri dengan salah satu perilaku kolektif, maka besar peluang partisipasi aktif dari masyarakat akan terbentuk.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Sumodiningrat, 1998:43). Adimihardja dan Hikmat (2001:72) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan pelimpahan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara penuh. Pemberdayaan bukan berarti melepaskan pengendalian, tapi menyerahkan pengendalian. Dengan demikian pemberdayaan bukanlah masalah hilangnya pengendalian atau hilangnya hal-hal lain. Yang paling penting, pemberdayaan memungkinkan pemanfaatan kecakapan dan pengetahuan masyarakat seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Menurut Priyono dan Pranarka (1996:68) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan primer menekan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, proses pemberdayaan dengan kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Seringkali kecenderungan primer terwujud melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya disebutkan bahwa proses pemecahan masalah berbasiskan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan prinsip berbeda bersama masyarakat menyadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali kebutuhannya dan dilatih untuk dapat merumuskan rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya. Dalam hal ini, praktisi pembangunan berperan dalam memfasilitasi proses dialog, diskusi, curah pendapat, dan mensosialisasikan temuan masyarakat.

Menurut Mubyarto (1999:42), pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan
commit to user

akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif.

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat power (daya). Pada dasarnya daya atau power tersebut dimiliki oleh setiap individu dan kelompok, akan tetapi kadar dari power tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, harta, kedudukan dan jenis kelamin. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu dengan dikotomi subyek (penguasa) dan obyek (yang dikuasai). Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek dan obyek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Pemberdayaan merupakan proses pematihan pola relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan yang dimiliki obyek atau dengan kata lain bahwa obyek dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan menggunakan daya yang ada padanya serta dibantu juga dengan daya yang dimiliki oleh subyek. Dalam pengertian yang lebih luas, mengalirnya daya ini merupakan upaya atau cita-cita untuk mewujudkan masyarakat miskin ke dalam aspek

kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah “beralihnya fungsi individu atau kelompok yang semula sebagai obyek menjadi subyek (yang baru)”, sehingga relai sosial yang ada nantinya hanya akan didirikan dengan relasi antara subyek dengan subyek yang lain. Dengan kata lain, proses pemberdayaan berarti mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek (Priyono dan Pranarka, 1996:74).

Proses mengalirnya daya atau kuasa (*power sharing*) merupakan faktor penting dalam mewujudkan pemberdayaan, tetapi sulit didalam pelaksanaannya. Apabila yang satu mempunyai daya dan yang lain tidak punya, maka ini berimplikasi kepada hilangnya daya pada salah satu pihak. Dalam hubungan daya seperti ini maka faktor yang berperilaku rasional dianggap tidak mungkin bekerjasama karena hanya akan merugikan diri sendiri. Maka dalam pengaliran daya tersebut bersifat tidak menguntungkan kepada kedua belah pihak (*zero-sum*). Apabila yang berlaku daya suatu unit sosial secara keseluruhan meningkat, maka semua anggotanya dapat menikmati keuntungan secara bersama-sama, artinya pemberian daya kepada pihak lain dapat meningkatkan daya sendiri atau dengan kata lain bersifat *positive-sum*. Dalam kasus ini, pemberian daya kepada lapisan miskin secara tidak langsung juga akan meningkatkan daya si pemberi, yaitu si “penguasa”.

Pemberdayaan masyarakat selain merupakan proses pengaliran daya antara pihak penguasa kepada yang dikuasai juga meliputi penguatan

pada pranata-pranatanya. Dalam rangka pembangunan nasional upaya pembangunan masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, perlindungan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya sistem ekonomi dan politik (Teguh, 2004:112).

Di dalam kerangka pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, maka haruslah terjadi pergeseran fungsi birokrasi sebagai fasilitator. Selayaknya birokrasi harus kembali ke hakikat fungsi yang sebenarnya ialah sebagai pelayan masyarakat (*public servant*), maupun pemberdayaan (*empowering*). Rakyat memegang hak dan wewenang yang tinggi untuk menentukan kebutuhan pembangunan, ikut terlibat secara aktif dalam pembangunan dan mengontrolnya serta memperoleh fasilitas dari pemerintah (Santoso, 2002:33). Pendekatan pemberdayaan masyarakat setidaknya akan berfokus pada cara bagaimana memobilisasi sumber-sumber lokal, menggunakan keragaman kelompok sosial dalam mengambil keputusan, dan sebagainya. Dalam prosesnya masyarakat lokal haruslah menjadi elemen utama dalam program pengembangan masyarakat. Di sini sesungguhnya partisipasi mengambil peran sebagai

suatu proses pemberdayaan yang dapat membantu untuk menampilkan dan menjelaskan suara-suara dari masyarakat yang selama ini tidak terdengar (Prasetijo, 2003:68).

Teguh (2004:34) mengemukakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi :

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran di dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdaya/ aktor/ pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektif-nya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya

saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan adanya semangat tersebut diharapkan dapat mengantarkan masyarakat untuk sampai pada kesadaran dan kemauan untuk belajar. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan untuk memperbaiki kondisi.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-ketrampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan-ketrampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-ketrampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan

dilandasi oleh kemampuan masyarakat di dalam membetuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal sebagai fasilitator saja.

Sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (1998:56) maka masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tersebut tetap memerlukan perlindungan, supaya dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan. Disamping itu kemandirian mereka perlu dilindungi supaya dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik, dan selanjutnya dapat mebentuk kedewasaan sikap masyarakat.

3. Kemiskinan

Kemiskinan dan keterbelakangan merupakan fenomena sosial yang menjadi atribut negara-negara dunia ketiga. Fenomena ini juga merupakan kebalikan dari kondisi yang dialami oleh negara-negara maju yang memiliki atribut sebagai “*model*”. Untuk memahami definisi dan asal mula kemiskinan dan keterbelakangan, kita dapat melakukan kajian dengan cara :

- 1) Mengadakan telaah terhadap kemiskinan dan kosakata kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Friedmann (1992: 160) dan Korten (1990: 67);
- 2) Membandingkan dengan konsep-konsep modernisasi sebagai kebalikan yang diametral dari kemiskinan dan keterbelakangan seperti yang dikemukakan oleh para pakar yang terkumpul dalam ontologi "*Modernization : The Dynamics of Growth*" (Myron Weiner, 1967 dalam Korompis, 2005:21).

Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di perdesaan atau di daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Persoalan kemiskinan juga selalu berkaitan dengan masalah-masalah lain, misalnya lingkungan. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. Kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, mereka sering merupakan pihak yang menanggung beban kerja yang lebih berat dari pada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat adanya ketidak merataan tersebut dan kualitas hidup.

Masa depan mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok-kelompok minoritas tertentu. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan. Kemiskinan berkaitan

erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja dan tingkat kemiskinan sangat tinggi.

Untuk memahami lebih jauh persoalan kemiskinan ada baiknya memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan (Friedmann, 1992: 89) sebagai berikut :

- a. ***Powerty line*** (garis kemiskinan). Yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial. Ia biasanya dihitung berdasarkan *income* yang dua pertiganya digunakan untuk “*keranjang pangan*” yang dihitung oleh ahli statistik kesejahteraan sebagai persediaan kalori dan protein utama yang paling murah.
- b. ***Absolute and relative poverty*** (kemiskinan absolut dan relatif). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan (karitas/amal). Sedangkan relatif adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan *income* relatif.
- c. ***Deserving poor*** adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan. ***Target population*** (populasi sasaran adalah kelompok orang tertentu yang *commit to user*

dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan. Friedmann juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhandasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (2) pangan, sandang, papan dan sebagainya).
- (3) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan (3) untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).

Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia. enciptaan lapangan kerja (*employment*) baik ebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk

memenuhi kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Selama periode 1976 sampai 1993, telah terjadi peningkatan batas garis kemiskinan, yang disesuaikan dengan kenaikan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1998: 26).

Garis kemiskinan lain yang paling dikenal adalah garis kemiskinan Sajogyo, yang dalam studi selama bertahun-tahun menggunakan suatu garis kemiskinan yang didasarkan atas harga beras. Sajogyo mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Dengan menerapkan garis kemiskinan ini kedalam data SUSENAS (Survei SosialEkonomi Nasional) dari tahun 1976 sampai dengan 1987, akan diperoleh persentasi penduduk yang hidup di bawah kemiskinan (dalam Kuncoro, 1997:116).

4. Masalah Kemiskinan

Menurut Baswir, (1997: 23), Sumodiningrat, (1998: 90). Secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

a. Kemiskinan absolut

Merupakan adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.

a. **Kemiskinan relatif**

adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) *Kemiskinan natural*, (2) *Kemiskinan kultural*, dan (3) *Kemiskinan struktural*.

(Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23).

b. **Kemiskinan natural** adalah keadaan miskin karena dari awalnya sudah miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai "*Persisten Poverty*" yaitu

kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

5. Strategi Pengintegrasian Keadilan Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah untuk secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Langkah awal dimulai dari analisis kemiskinan dengan perspektif gender, lalu diikuti dengan diagnosis kemiskinan berdasarkan perspektif gender, dan pengkajian ulang kebijakan serta strategi kebijakan yang responsif gender. Rencana aksi dan pemantauan evaluasinya juga harus menyertakan komponen gender (Suryahadi, 2004:5)

Program pengentasan kemiskinan yang responsif gender tidak bisa dibuat hanya dengan menyisipkan beberapa program pemberdayaan perempuan. Keseluruhan proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan program tersebut haruslah berperspektif gender. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk melihat apakah program pengentasan kemiskinan sudah berperspektif gender atau belum.

6. Penggunaan Analisis Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang

penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya.

Indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan perempuan, antara lain adalah:

- a. Perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara.
- b. Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah.
- c. Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
- d. Perempuan mendapatkan gaji yang berbeda untuk pekerjaan yang sama.
- e. Perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri.
- f. Perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya, karena tanah dan aset lainnya atas nama suami, bapak, saudara laki-laki atau kakek.
- g. Perempuan lebih rendah pendidikannya dari pada laki-laki karena asumsi bahwa perempuan setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga sehingga investasi untuk sekolah perempuan dianggap tidak menguntungkan.

- h. Kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran pemerintah bagi kesehatan dasar untuk posyandu dan puskesmas masih sangat rendah.

B. Kerangka Pemikiran

Beberapa aspek penting dari pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kemampuan/keterampilan berusaha (1) aspek SDM seperti pendidikan dan latihan/keterampilan (pelatihan); (2) aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri); (3) aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan di lapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif.

1. Pelatihan

Pelatihan tidak terlepas kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu unsur utama manajemen yang meliputi : kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan/mengontrol dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan

pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri (Korompis, 2005:87).

Hidayat (1998:86) mengemukakan aspek pengembangan SDM yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan/keterampilan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang antara lain meliputi pengetahuan dan keterampilan yang akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan meningkatkan produktifitas.

Menurut Korompis, (2005:84), agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri.

Suseno (1995:46) menjelaskan secara lebih luas konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat mencakup peningkatan partisipasi manusia, yaitu peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, dan perluasan berusaha. Dengan pengertian ini maka pengembangan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pengembangan, baik dalam dimensi hak maupun dimensi kewajiban. Dalam dimensi hak, maka setiap warga masyarakat mempunyai hak-hak pengembangan yang dapat dinikmati berupa kemudahan-kemudahan memperoleh fasilitas kehidupan atau yang berupa barang dan jasa yang diperoleh sebagai kontraprestasi kerja yang

dilakukan; sedangkan dalam dimensi kewajiban, setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban turut serta dalam proses pengembangan.

2. Bantuan modal

Selain pendidikan dan latihan, dalam setiap usaha, modal usaha sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit) usaha. Hal ini ditegaskan oleh Korompis, (2005:91) bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja; selain teknologi tepat guna; model manajemen usaha; pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Selain pendidikan dan latihan, dalam setiap usaha, modal usaha sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit) usaha. Hal ini ditegaskan oleh Korompis, (2005:89) bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja; selain teknologi tepat

guna; model manajemen usaha; pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha; ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Pada satu sisi, walaupun suatu usaha telah memiliki modal sendiri namun jumlahnya terbatas, maka akan mengalami pula kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga kurang berpeluang untuk bersaing serta memperoleh pendapatan atau keuntungan yang memadai; dan di sisi lain, bahwa walaupun ada modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik, efisien dan efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami kerugian dalam berusaha. Dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha anggota kelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Korompis, 2005:93).

3. Cara-cara mengolah usaha

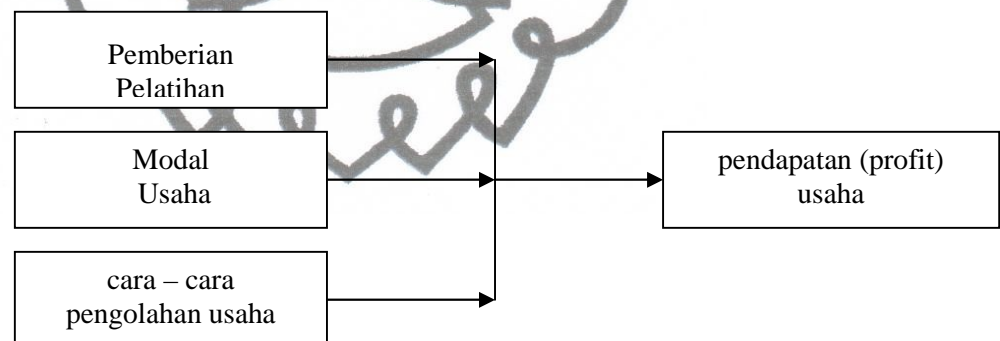
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pendidikan dan latihan serta modal usaha belum secara otomatis dapat menjamin suatu usaha mampu meningkatkan profit usahanya tanpa didukung dengan suatu cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti

commit to user

memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut.

Zainun (1993:21) mengartikan dengan daya yang bersumber pada manusia, yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan (*power*). Tenaga dan kekuatan yang bersumber dari manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, pendapan pengalaman, dan lain-lain yang berupa potensi fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lain-lainnya.

Cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan usaha (Korompis, 2005:96).



Gambar 1
Kerangka pemikiran penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan secara teoritis bahwa pemberdayaan sektor informal yang berkaitan dengan pengelolaan unsur manusia (pendidikan dan latihan), unsur uang (modal usaha) dan cara-cara berusaha yang baik, baik secara simultan maupun

secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan atau penghasilan (profit usaha). Gambar 1 merupakan kerangka pemikiran penelitian pemberian pelatihan /pendidikan, modal usaha dan cara – cara pengolahan usaha berpengaruh terhadap pendapatan (profit) usaha secara parsial maupun secara bersama.

C. Hipotesis

1. Pengaruh pelatihan terhadap pendapatan usaha

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesakan :

Hipotesis 1 : Tidak terdapat pengaruh pemberian pelatihan terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

2. Pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan usaha

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dihipotesakan :

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberian bantuan modal terhadap pendapatan atau penghasilan (profit usaha) anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

3. Pengaruh cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan usaha

Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pemberian cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan atau penghasilan (profit usaha) anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

4. Pengaruh pendidikan/pelatihan, modal usaha dan cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan usaha

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pendidikan dan latihan serta modal usaha belum secara otomatis dapat menjamin suatu

usaha mampu meningkatkan profit usahanya tanpa didukung dengan suatu cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut (Turang, 1995).

Todaro (2003) mengemukakan bahwa pengetahuan dan keterampilan memungkinkan orang untuk bekerja lebih baik. Dengan bekerja keras, seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, maka akan meningkat pula pendapatan/penghasilan (profit) usaha mereka.

Keterbatasan modal sendiri yang dimiliki dapat menghambat pendapatan usaha, dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha anggota kelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Korompis, 2005:98).

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini :

Hipotesis 4 :Terdapat pengaruh positif dan signifikan bersama – sama pemberian pelatihan, pemberian bantuan modal usaha dan cara – cara mengolah usaha terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga di Desa Karangtalun Kecamatan Tanon dengan keadaan demografis sebagai berikut :

Jumlah penduduk : 3.210 orang

Laki – Laki : 1.336 orang

Perempuan : 1.574 orang

Jumlah KK : 817 KK

Jumlah penduduk miskin menurut umur :

Kurang 20 Tahun : 0 KK

21 – 30 Tahun : 18 KK

31 – 40 Tahun : 61 KK

41 – 50 Tahun : 63 KK

Lebih 60 tahun : 109 KK

Jumlah penduduk miskin : 956 orang

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini 60 responden dari 10 kelompok mitra binaan (masing – masing kelompok terdiri dari 6 anggota) rumah tangga di masing-masing RT yang diambil secara acak sederhana

commit to user

dengan menggunakan teknik *purposive random sampling* dari 3 (tiga) Kebayanan, dengan 22 RT. Sampel dalam penelitian berdasarkan random didapatkan kelompok P2MBG yang berasal dari (1) RT 14 dan 15, (2) RT 16, (3) RT 17 (4) RT 18 (5) RT 19 dan (6) RT 20 masing – masing terdiri dari 10 KK.

Dasar Pelaksanaan kegiatan Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2M-BG) Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen adalah :

- 1) Keputusan Bupati Sragen No 411.4/4/03/2004, tentang penunjukkan desa/lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) Kabupaten Sragen Tahun 2004 – 2008.
- 2) Keputusan Bupati Sragen Nomor 411.4/87/02/2008, tentang pembentukan Tim Pelaksana P2MBG Kabupaten Sragen Tahun 2008.
- 3) Keputusan Camat Tanon Nomor 411.4/875/55/2008, tentang tentang pembentukan Tim Pelaksana P2MBG Kecamatan Tanon Tahun 2008.

Desa Karangtalun terdiri dari 3 (tiga) Kebayanan, 22 RT ddengan jarak dari kantor kecamatan sejauh 5 Km. Desa Karangtalun berbatasan dengan Desa Gading di utara, Desa Ketro di timur, Desa Sambitduwur di selatan dan Desa Nganti di sebelah barat. Desa Talon

termasuk desa agraris dengan luas tanah (1) Sawah sebesar 1385 Ha, (2) Pekarangan sebesar 863.220 Ha (3) Tanah kering 73.215 Ha. Kesuburan tanah di Desa Karangtalun termasuk sedang karena sebagian besar merupakan lahan pertanian tadah hujan, dan pengairan dengan pompa milik petani (Pemda Sragen, 2008).

Masyarakat mitra yang dipilih untuk menjadi subyek dalam program terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2M-BG) adalah :

- 1) Keluarga Inti (terdiri dari suami, istri dan anak)
- 2) Kriteria pemilihan keluarga inti yang menjadi masyarakat mitra adalah keluarga miskin yang terdiri dari (1) RT 14 dan 15, (2) RT 16, (3) RT 17 (4) RT 18 (5) RT 19 dan (6) RT 20 masing – masing terdiri dari 10 KK.

B. Metoda Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan kejelasan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi (Ghozali, 2005:93).

a. Uji Normalitas

Dalam menguji normalitas pada penelitian ini digunakan kolmogorov-smirnov. Jika kolmogorov-smirnov hitung lebih besar dari kolmogorov-smirnov tabel maka sebaran data dikatakan mendekati distribusi normal atau normal. Sebaliknya, jika kolmogorov-smirnov hitung lebih kecil dari kolmogorov-smirnov tabel maka sebaran data dikatakan tidak mendekati distribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 2005:147).

b. Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan bantuan SPSS dilakukan dua tahap, yaitu menghitung nilai residual absolutnya terlebih dahulu baru menghitung korelasi antara nilai variabel dengan nilai residual. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak diantara data – data pengamatan dapat dilihat nilai koefisien signifikansinya (dalam hal ini ditetapkan $\alpha = 5\%$). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari α (5%), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut (Ghozali, 2005:125).

c. Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 (Ghozali, 2005:93).

d. Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi hasil pengolahan ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam satu variabel. Konsekuensi dari autokorelasi adalah biasanya varian dengan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, sehingga nilai R^2 dan F cenderung *overestimated*. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian Durbin Watson (DW) dengan ketentuan : nilai DW antara 1,65 sampai 2,35 dapat disimpulkan tidak ada Autokorelasi (Ghozali, 2005:99).

2. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui pengaruh variabel pelatihan, modal usaha dan cara – cara mengolah usaha terhadap pendapatan usaha digunakan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Dengan persamaan regresi log linier berganda (dengan bilangan natural $e = 2,7$) adalah :

$$\text{Ln}Y_i = a + b_1\text{Ln}X_{1i} + b_2\text{Ln}X_{2i} + b_3\text{Ln}X_{3i}$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Usaha

- X_1 = Pelatihan
 X_2 = Modal Usaha
 X_3 = Cara – cara mengolah usaha
 a = Konstanta
 b_1, b_4 = Koefisien variabel $X_1 - X_3$
 i = 1,2,3n; n = Jumlah anggota sampel

a. Uji t

Uji ini untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2005:86).

Statistik uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

b. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, apabila nilai signifikan $> 0,05$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama

commit to user

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:87).. Mencari Harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{i,j} = \frac{(\bar{X}_i - \bar{X}_j)^2}{RKG \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)}$$

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen. Jika R^2 mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik.

C. Definisi Operasional

Variabel yang diteliti dibedakan kedalam dua kategori, yaitu (1) variabel bebas atau *independent variable* terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu Pemberian Pelatihan (X1), Pemberian Modal Usaha (X2) dan Pemberian Cara – cara Mengolah Usaha (X3)) Variabel tak bebas, yaitu Pendapatan Usaha anggota P2M-BG (Y).

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

commit to user

1. Pemberian pelatihan sebagai variabel bebas satu (X1) dikonsepsikan sebagai upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan teknis/keterampilan kelompok P2M-BG dalam mengelola usaha mereka melalui pendidikan dan latihan (pelatihan yang dilakukan oleh instansi terkait, seperti Depkop dan Pembinaan UKM, Depnaker-Trans dan pihak BUMN (Korompis, 2005:53).

Variabel ini diukur melalui beberapa indikator, di antaranya : frekuensi dan intensitas keikutsertaan anggota P2M-BG dalam program pelatihan, tingkat kesesuaian materi pelatihan dengan bidang usaha, tingkat pemahaman terhadap materi pelatihan.

2. Bantuan modal sebagai variabel bebas dua (X2) dimaksudkan adalah pembinaan pemerintah di sektor permodal dalam bentuk pemberian kredit lunak tanpa agunan. Indikator variabel ini diukur dari besarnya bantuan modal yang diterima anggota P2M-BG (dalam rupiah) (Korompis, 2005:54).
3. Cara-cara mengolah usaha sebagai variabel bebas tiga (X3) diukur melalui beberapa indikator, antara lain : (1) menerapkan secara konsisten dan kontinu pembukuan dalam mengelola usaha (2) menerapkan pula secara konsisten dan kontinu pembukuan dalam rangka (3) kebutuhan rumah tangga/keluarga; (4) Semaksimal mungkin menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu (Korompis, 2005:54).

4. Tingkat Pendapatan (profit usaha), sebagai variabel terikat (Y) didefinisikan sebagai sejumlah uang atau barang/jasa yang diterima oleh pihak anggota P2M-BG dari hasil usaha sesuai bidang usaha yang dikelolanya (Korompis, 2005:54).

Variabel ini diukur melalui keuntungan bersih per bulan untuk anggota P2M-BG



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program

Program P2MBG di Desa Karangtalun, Kecamatan tanon Kabupaten Sragen dilaksanakan mulai bulan Februari 2008. Tahap kegiatan dalam pelaksanaan program dilaksanakan secara partisipatif yang memfokuskan pada proses belajar dan kesadaran kritis dengan melibatkan secara penuh masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Data Dasar

Kegiatan dalam penyusunan data dasar dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik partisipatif yang difasilitasi oleh fasilitator desa, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Masalah
- b. Identifikasi Kebutuhan
- c. Identifikasi Potensi

Hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat mitra dengan peringkat sebagai berikut:

- a. Banyak Masyarakat Mitra tidak bisa baca tulis.
- b. Anak Masyarakat Mitra terancam putus sekolah.
- c. Banyak pekarangan belum dimanfaatkan secara optimal.
- d. Mandi, Cuci dan Kakus (WC) di sungai.
- e. Saluran Pembuangamn Air Limbah (SPAL) belum ada.

commit to user

- f. Rumah kurang layak huni.
- g. Lantai rumah masih tanah.
- h. Banyak masyarakat mitra tidak memiliki ketrampilan.
- i. Terbatasnya kesempatan kerja sebagai akibat tidak memiliki ketrampilan kerja.
- j. Rendahnya pemahaman tentang ketahanan keluarga.
- k. Jalan banyak yang rusak.

(Pemda Sragen, 2008).

2. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan hasil pengorganisasian masalah dan penentuan peringkat masalah yang dianggap paling mendesak untuk segera ditangani, maka disusun rencana program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF)
- b. Inventarisasi anak usia sekolah dari masyarakat mitra.
- c. Pembuatan cemplongan tanaman untuk ditanami buah-buahan, pisang dan empon-empon.
- d. Pembuatan MCK yang memenuhi standart kesehatan.
- e. Pembuatan SPAL disetiap rumah tangga.
- f. Pemugaran Rumah.
- g. Plesterisasi lantai rumah.
- h. Kursus ketrampilan (Menjahit, salon, anyaman, home industri dll).
- i. Program magang bagi masyarakat mitra yang memiliki ketrampilan di perusahaan/program bapak angkat.

- j. Pembentukan kelompok usaha produktif.
- k. Pembentukan catur bina (BKB, BKR, BKL dan BLK)
- l. Perbaiki Jalan.

(Pemda Sragen, 2008).

3. Kegiatan yang telah dilaksanakan

- a. Pembentukan Kelompok KF, lokasi dirumah Bapak Hartono RT 18 Desa Karangtalun.
- b. Sosialisasi wajib belajar 12 tahun oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tanon.
- c. Pemberian Beasiswa murid berprestasi anak KK Miskin.
- d. Penanaman Pohon pisang, buah-buahan, jahe, kencur, tanaman hias, dan budidaya ikan lele.
- e. Pembuatan MCK
- f. Pembuatan SPAL.
- g. Pemugaran Rumah Layak Huni kepada 10 KK dengan sistem bergulir.
- h. Pemasangan Genting kaca, pembuatan skat ruangan dan penataan ruang.
- i. Pembuatan Kandang ternak terpisah.
- j. Plesterisasi lantai rumah.
- k. Latihan ketrampilan menjahit.
- l. Latihan Ketrampilan membuat anyaman tas dari plastik.
- m. Penyuluhan tenaga kerja wanita.

n. Pembentukan Catur Bina

(1) Bina Keluarga Balita (BKB)

(2) Bina Keluarga Remaja (BKR)

(3) Bina Keluarga Lansia (BKL)

(4) Bina Lingkungan Keluarga (BLK)

o. Pengecoran Jalan.

(Pemda Sragen, 2008).

4. Fasilitas/Bantuan yang diterima

a. Perbaikan Jamban dan Kandang Ternak dari PKK Kab. Sragen Rp. 12.000.000,-

b. Menunjang Rumah Sehat dan Papan Data dari Dinas PKBM Kabupaten Sragen Rp. 7.100.000,-

c. Bantuan Bibit Toga (Kencur dan Jahe) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen

- Kencur 11 kuintal (Rp. 7.150.000,-)

- Jahe 21 kuintal (Rp. 8.400.000,-)

d. Perbaikan lingkungan (cor Jalan) dari Dinar Sosial Kabupaten Sragen Rp. 25.000.000,-

e. Menunjang Perbaikan ekonomi dari dinas Sosial Kabupaten Sragen Rp. 22.000.000,-

f. Pemugaran Rumah 13 orang @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 65.000.000,- dari Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

commit to user

- g. Ternak sapi 10 Kelompok @ Rp. 17.000.000,- = Rp. 180.000.000,- dari Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.
 - h. Bantuan Bibit Mangga (500 batang/Rp. 2.500,000,-), Bibit Nangka (60 Batang/Rp. 250.000,-), dari Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.
 - i. Bantuan Semen 50 Zak Semen (Rp. 1.900.000,-) = Rp. 8.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Sragen.
 - j. Pembuatan kolam lele Rp. 4.740.000,- dari Dinas Peternakan dan perikanan.
 - k. Pemugaran rumah Rp. 65.000.000,- dari Dinas Sosial.
- (Pemda Sragen, 2008).

5. Swadaya Masyarakat

- a. Perbaikan Jamban: Rp. 2.400.000,-
- b. Menunjang Rumah Sehat dan Papan Data Rp. 1.500.000,-
- c. Perbaikan lingkungan (Cor Jalan) Rp. 85.000.000,-
- d. Pembuatan kolam lele Rp 4.5000.000,-
- e. Pemugaran rumah Rp. 80.000.000,-
- f. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Rp. 88.000.000,-
- g. Pos Siskamling Rp. 15.000.000,-
- h. Swadaya Murni Masyarakat (Cor Jalan) Rp. 60.000.000,-

(Pemda Sragen, 2008).

6. Tata kerja P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Program pengentasan kemiskinan memuat strategi dan langkah-langkah untuk secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin.

commit to user

Langkah awal dimulai dari analisis kemiskinan dengan perspektif gender, lalu diikuti dengan diagnosis kemiskinan berdasarkan perspektif gender, dan pengkajian ulang kebijakan serta strategi kebijakan yang responsif gender. Rencana aksi dan pemantauan evaluasinya juga harus menyertakan komponen gender.

Program pengentasan kemiskinan yang responsif gender tidak bisa dibuat hanya dengan menyisipkan beberapa program pemberdayaan perempuan. Keseluruhan proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan program tersebut haruslah berperspektif gender. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk melihat apakah program pengentasan kemiskinan sudah berperspektif gender atau belum.

Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya.

Indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan perempuan, antara lain adalah:

- 1) Perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara.

- 2) Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah.
- 3) Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
- 4) Perempuan mendapatkan gaji yang berbeda untuk pekerjaan yang sama.
- 5) Perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri.
- 6) Perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya, karena tanah dan aset lainnya atas nama suami, bapak, saudara laki-laki atau kakek.
- 7) Perempuan lebih rendah pendidikannya dari pada laki-laki karena asumsi bahwa perempuan setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga sehingga investasi untuk sekolah perempuan dianggap tidak menguntungkan.
- 8) Kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran pemerintah bagi kesehatan dasar untuk posyandu dan puskesmas masih sangat rendah.

Kemiskinan sangat berpengaruh pada rumah tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selama ini adanya konsep pembagian kerja dan tanggung jawab atas dasar gender telah menyebabkan perempuan terbelenggu pada pekerjaan-pekerjaan produktif tanpa upah,

padahal mereka mempunyai sumbangan pada usaha ekonomi melalui kerja upahan.

Sumbangan pekerjaan mereka baik di sektor rumah tangga maupun pekerjaan upahan tidak diperhitungkan dalam statistik nasional. Dalam kondisi semakin berkurangnya peranannya mereka, maka perempuan menanggung beban lebih berat karena harus mengatasi permasalahan ekonomi rumah tangga untuk dapat terus bertahan hidup (*survive*). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat berat bagi perempuan yang hidup pada keluarga-keluarga miskin.

Kemiskinan yang disandang perempuan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen Jawa Tengah berhubungan langsung dan ditandai dengan tidak adanya kemandirian dan peluang-peluang ekonomi, kurangnya akses pada segala sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi, akses kredit, kepemilikan dan pelatihan-pelatihan, termasuk juga kurangnya akses pada pendidikan formal, pelayanan kesehatan dan pelayanan-pelayanan pendukung lainnya, maupun partisipasi minimal dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat desa dapat dikembangkan dengan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi diharapkan secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, terutama yang dapat mewadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan lembaga yang sebaiknya ditetapkan oleh pemerintahan desa. Maksud tersebut diperlukan adanya kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat sendiri (*bottom up*), bukan lagi dibentuk dari pemerintah (*top down*).

Sehubungan dengan itu, diperlukan langkah-langkah baik oleh pemerintah maupun masyarakat (*stakeholders*) sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam yang tersedia pada tingkat lokal, dengan tetap menjaga dan memelihara kelestarian potensi sumberdaya alam tersebut. Hal ini dapat dijadikan model bagi terciptanya pembangunan berbasis kompetensi masyarakat lokal dan model pembangunan berkelanjutan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah dengan adanya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender (P2M-BG). P2M-BG adalah sebuah model pemberdayaan masyarakat secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan. Dengan demikian fokus program ini

commit to user

adalah peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan.

Kebijakan yang dilakukan menangani kemiskinan tersebut dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat mitra melalui proses belajar untuk menumbuhkan kesadaran kritis,
- 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat,
- 3) peningkatan pemahaman dan kepedulian tentang tindak kekerasan terhadap masyarakat,
- 4) peningkatan kualitas lingkungan hidup,
- 5) peningkatan kesempatan berusaha,
- 6) peningkatan keterpaduan dan koordinasi dalam pengelolaan program,
- 7) peningkatan partisipasi dan keswadayaan untuk menjamin kelangsungan program, dan
- 8) penguatan kelembagaan masyarakat.

B. Deskripsi Responden

Data hasil penelitian di Desa Karangtalun yang terdiri dari 3 (tiga) Kebayanan, dengan 22 RT yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah kelompok P2MBG yang berasal dari RT 14 dan 15, (2) RT 16, (3) RT 17 (4) RT 18 (5) RT 19 dan (6) RT 20 masing – masing terdiri dari 10 KK.

Pada penelitian ini, data demografi responden adalah jenis kelamin, usia, jumlah tanggungan keluarga, dan jenis usaha yang dilakukan saat ini ditunjukkan Tabel 1 sampai Tabel 7.

Tabel 1
Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

jenis kelamin	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	26	43,3	43,3
Perempuan	34	56,7	100,0
Total	60	100,0	

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 1 menunjukkan jenis kelamin responden. Dari hasil pengumpulan kuesioner 60 orang, sebanyak 34 (56,7,7%) responden adalah perempuan dan sisanya 26 (43,3%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 2
Deskripsi responden berdasarkan umur

umur	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Kurang 30 Tahun	4	6,7	6,7
30 - 39 Tahun	18	30,0	36,7
40 - 49 Tahun	23	38,3	75,0
50 Tahun Keatas	15	25,0	100,0
Total	60	100,0	
Rata-rata	42.6		

Sumber : Data primer diolah (2010)

Tabel 2 menunjukkan deskripsi responden berdasarkan umur, rata – rata umur responden adalah 42,6 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penerima dana P2MBG di desa karangtalun, kecamatan tanon memiliki umur paruhbaya. Sebanyak 4 (6,7%) responden berumur kurang dari 30 tahun, sebanyak 18 (30,0%) responden umurnya berkisar antara 30 – 39 tahun, Umur responden

antara 40 – 49 tahun sebanyak 23 (38,3%), dan umur 50 tahun keatas ada 15 (25,0%) responden.

Tabel 3
Deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan keluarga (orang)	Frequency	Percent	Cumulative Percent
2.00	9	15,0	15,0
3.00	22	36,7	51,7
4.00	27	45,0	96,7
5.00	2	3,3	100,0
Total	60	100,0	
Rata-rata	3,3667		

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 3 menunjukkan deskripsi responden berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, rata – rata jumlah tanggungan keluarga adalah 3,36 orang, hal ini menunjukkan bahwa keluarga di desa Karangtalun kecamatan Tanon adalah keluarga sedang. Sebanyak 9 (15,0%) responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 2 orang, 22 (36,70%) responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 3 orang, responden. 27 (45,0%) responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 4 orang, dan 2 (3,3%) responden memiliki jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 orang

Tabel 4
Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan

	Frequency	Percent	Cumulative Percent
PAKET A	4	6,7	6,7
SD	38	63,3	70,0
SMP	18	30,0	100,0
Total	60	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 4 menunjukkan deskripsi responden berdasarkan pendidikan. Pendidikan responden yang nberpendidikan SMP sebanyak 18 (30,0%) responden, sekolah dasar sebanyak 38 (63,3%) responden dan Paket A sebanyak 4 (6,7) responden. Berdasar tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di desa Karangtalun kecamatan tanon masih sangat rendah.

Tabel 5
Deskripsi responden berdasarkan jenis usaha

Jenis usaha	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Industri RT	32	53,3	53,3
Beternak	9	15,0	68,3
Berdagang	19	31,7	100,0
Total	60	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 5 menunjukkan deskripsi responden berdasarkan jenis usaha yang dilakukan saat ini. Jenis usaha yang dilakukan di desa Karangtalun kecamatan Tanon didominasi oleh penduduk yang memiliki usaha berupa industri rumah tangga (anyaman dan makanan ringan) sebanyak 32 (53,3%) responden, berternak (ikan, ayam dan kambing) sebanyak 9 (15,0%) responden dan yang usahanya berdagang (asongan, warung makan, sayuran, jamu dan kelontong) sebanyak 19 (31,7%).

Tabel 6 menunjukkan dana bantuan modal usaha dari program P2MBG di desa Karangtalun kecamatan Tanon. Rata – rata modal usaha yang diterima responden adalah Rp 350.000,00, hal ini menunjukkan bahwa dana modal usaha yang diterima relatif kecil untuk sebuah usaha di pedesaan. Responden yang mendapatkan dana modal usaha sebesar Rp 300.000,00

sebanyak 26 (43,3%) orang, responden yang mendapatkan dana modal usaha sebesar Rp 350.000,00 sebanyak 16 (26,7%) orang, Responden yang mendapatkan dana modal usaha sebesar Rp 500.000,00 sebanyak 16 (26,7%) dan yang mendapatkan Rp 800.000,00 hanya 2 (3,3%) orang.

Tabel 6
Deskripsi responden berdasarkan dana yang diterima

Dana yang diterima	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Rp 300.000.00	26	43,3	43,3
Rp 350.000.00	16	26,7	70,0
Rp 500.000.00	16	26,7	96,7
Rp 800.000.00	2	3,3	100,0
Total	60	100,0	
Rata - Rata	Rp 350.000.00		

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 7
Deskripsi responden berdasarkan hasil usaha perbulan

Hasil Usaha	Frequency	Percent	Cumulative Percent
Rp 600.000,00	9	15,0	15,0
Rp 700.000,00	12	20,0	35,0
Rp 750.000,00	32	53,3	88,3
Rp 800.000,00	5	8,3	96,7
Rp 900.000,00	2	3,3	100,0
Total	60	100,0	
Rata – Rata	Rp 726.500,00		

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 7 menunjukkan hasil usaha per bulan penduduk desa Karangtalon kecamatan Tanon. Rata – rata hasil usaha yang diperoleh responden adalah Rp 726.000,00, hal ini menunjukkan bahwa hasil usaha yang diperoleh cukup rendah. Responden yang memiliki penghasilan Rp 600.000,00 per bulan sebanyak 9 (15,0%) orang, yang berpenghasilan Rp

700.000,00 sebanyak 12 (20,0%) orang, yang berpenghasilan Rp 750.000,00 sebanyak 32 (53,3%) orang, yang berpenghasilan Rp 800.000,00 sebanyak 5 (8,3%) orang dan yang berpenghasilan Rp 900.000,00 sebanyak 2 (3,3%) orang,

C. Deskripsi Jawaban Responden

Hasil jawaban responden terhadap item – item pertanyaan tentang pemberian pelatihan dan cara-cara mengelola usaha yang dilakukan pada program P2MBG di desa Karangtalon, kecamatan Tanon ditunjukkan pada Tabel 8 dan 9.

Tabel 8
Deskripsi jawaban responden terhadap pemberian pelatihan pada program P2MBG

	X21	X22	X23
Mean	3.4833	3.5167	3.5167
Median	3.0000	3.0000	4.0000
Std. Deviation	0.53652	0.59636	0.50394
Minimum	3.00	3.00	3.00
Maximum	5.00	5.00	4.00
Sum	209.00	211.00	211.00

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 8 menunjukkan jawaban responden terhadap 3 (tiga) item pertanyaan tentang pemberian pelatihan yang dilakukan. Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa frekuensi dan intensitas keikutsertaan anggota P2M-BG dalam program pelatihan (X11) sudah sering hal ini karena memiliki rata – rata (3,48), tingkat kesesuaian materi pelatihan dengan bidang usaha (X12) sudah sesuai, dengan rata – rata jawaban responden sebesar 3,517 dan tingkat

pemahaman terhadap materi pelatihan (X13) sudah dapat memahami dengan rata – rata jawaban responden sebesar 3,517.

Tabel 9
Deskripsi jawaban responden terhadap cara-cara berusaha
pada program P2MBG

	X31	X32	X33
Mean	2.0667	2.0833	2.4000
Median	2.0000	2.0000	2.0000
Std. Deviation	0.25155	0.27872	0.61617
Minimum	2.00	2.00	1.00
Maximum	3.00	3.00	3.00
Sum	124.00	125.00	144.00

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Tabel 9 menunjukkan jawaban responden terhadap 3 (tiga) item pertanyaan tentang cara – cara melakukan usaha. Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa responden telah menerapkan secara konsisten dan kontinu pembukuan dalam mengelola usaha (X31), hal ini ditunjukkan dari rata – rata nilai X31 sebesar 2,07, responden juga telah menerapkan secara konsisten dan kontinu pembukuan dalam rangka kebutuhan rumah tangga/keluarga (X32), hal ini ditunjukkan dari rata – rata nilai X32 sebesar 2,08, dan responden belum maksimal dalam menghindari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu (X33), hal ini ditunjukkan dari rata – rata nilai X33 sebesar 2,40.

D. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat

tingkat ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan (konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* dengan cara membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah (Ghozali, 2009):

- 1) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen dari lebih besar 0,05 maka data berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel independen lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 10
Hasil uji normal dengan uji kolmogorov-smirnov

		Standardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97424460
Most Extreme Differences	Absolute	.149
	Positive	.097
	Negative	-.149
Kolmogorov-Smirnov Z		1.158
Asymp. Sig. (2-tailed)		.137

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

commit to user

Tabel 10 menunjukkan hasil uji *kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Hal ini terlihat pada nilai $Z_{\text{kolmogorov-smirnov}}$ residual variabel independen X_1, X_2 , dan X_3 dengan variabel dependen Y memiliki nilai dibawah Z_{tabel} (1,96) atau nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2009).

b. Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah regresi hasil pengolahan ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lain dalam satu variabel. Konsekuensi dari autokorelasi adalah biasanya varian dengan nilai yang lebih kecil dari nilai yang sebenarnya, sehingga nilai R^2 dan F cenderung overestimated. Cara untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian *Durbin Watson* (DW) dengan ketentuan : nilai DW antara 1,65 sampai 2,35 dapat disimpulkan tidak ada Autokorelasi (Ghozali, 2009).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan program SPSS. Didapatkan nilai DW dari data – data diatas dapat dilihat bahwa semua nilai *Durbin Watson* (DW) sebesar 2,195 (lampiran 5) yang berarti masih diantara 1,65 sampai 2,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan bebas dari autokorelasi.

c. Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas Uji yang harus dilakukan selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser yaitu meregresikan nilai residual yang diperoleh dengan variabel-variabel independennya. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan Tabel 11.

Tabel 11
Hasil uji heteroskedastisitas

Variabel		t_{hitung}	Sig
Dependen	Independen		
Residual Hasil Usaha	Pelatihan	0.00	1,00
	Dana Modal	0.00	1,00
	Cara Berusaha	0.00	1,00

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Hasil regresi residual dengan variabel independen menunjukkan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel (1,96) atau signifikansinya lebih besar dari 0,05. dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

d. Multikolinear

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi antara variabel independennya. Multikolinieritas yang berbahaya terjadi apabila nilai dari *variance inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 (Ghozali, 2009).

Tabel 12
Nilai VIF dan tolerance dari uji multikolinieritas

Variabel dependen	Variabel independen	<i>Tolerance</i>	VIF
Hasil Usaha (Y)	Pelatihan (X1)	0,919	1,088
	Modal Usaha (X2)	0,990	1,010
	Cara Berusaha (X3)	0,911	1,098

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Dari hasil pengolahan data, masing masing variabel dapat dilihat pada Tabel 12. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa semua nilai VIF jauh dibawah 10, dan nilai *tolerance* diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas.

2. Uji Hipotesis

Pengaruh – pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian digunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

a. Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel – variabel pelatihan (X1), modal usaha (X2), dan cara berusaha (X3) terhadap variabel dependen hasil usaha (Y). Tabel 13 menunjukkan

commit to user

hasil analisis regresi linear berganda variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 13 persamaan regresi linear yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = 10,917 - 0,012 \text{ Ln } X_1 + 0,173 \text{ Ln } X_2 + 0,204 \text{ Ln } X_3$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Usaha

X₁ = Pelatihan

X₂ = Modal Usaha

X₃ = Cara – cara mengolah usaha

Tabel 13

Hasil analisis regresi linear berganda variabel independen pelatihan (X1), modal usaha (X2), dan cara berusaha (X3) terhadap variabel dependen hasil usaha (Y).

variabel independen	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,917	0,568		19,233	0,000
Pelatihan (X1)	-0,012	0,083	-0,017	-,142	0,887
Modal Usaha (X2)	0,273	0,042	0,472	4,171	0,000*
Cara Berusaha (X3)	0,204	0,110	0,219	2,852	0,047*
F hitung		7,601	R Square		0,289
Sinifikansi		0,000	Adjusted R Square		0,251
R		0,538	Dependent Variable: hasil usaha (Y)		

*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pelatihan (X1) tidak signifikan mempengaruhi hasil usaha (Y), karena nilai $t_{hitung} (|-0,142|) < t_{tabel} (1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,887 < \leq 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dalam penelitian ini tidak terbukti.
- 2) Modal usaha (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil

- usaha (Y), karena nilai $t_{hitung} (4,171) > t_{tabel} (1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,00 \leq 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 dalam penelitian ini terbukti.
- 3) Cara berusaha (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil usaha (Y), karena nilai $t_{hitung} (2,852) > t_{tabel} (1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,047 \leq 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 dalam penelitian ini terbukti.
- 4) Pelatihan (X1), Modal usaha (X2), dan Cara berusaha (X3) secara simultan berpengaruh terhadap hasil usaha (Y), karena nilai $F_{hitung} (7,601) > F_{tabel} (4,96)$ dan tingkat signifikansi $0,000 \leq 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 dalam penelitian ini terbukti.
- 5) Variabel Modal usaha (X2) lebih dominan dalam mempengaruhi hasil usaha (Y) karena memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan koefisien pelatihan (X1, - 0,012) dan cara berusaha (X3, 0,204) yaitu 0,273.
- 6) Nilai *Adjusted. R*² (0,25,1) menunjukkan bahwa Modal usaha (X1), Pelatihan (X2) dan Cara berusaha (X3) dapat menjelaskan sejumlah varian dari hasil usaha (Y) sebesar 25,1%, sedangkan sisanya sebesar 74,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini.

Tabel 14 menunjukkan ringkasan hasil uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda.

Tabel 14
Hasil uji hipotesis

Hipo-tesis	Hubungan	Hasil uji	Kesimpulan
H1	$X1 \rightarrow Y$	tidak signifikan	tidak terbukti
H2	$X2 \rightarrow Y$	signifikan, positif	terbukti
H3	$X3 \rightarrow Y$	signifikan, positif	terbukti
H4	$X1, X2, \text{ dan } X3 \rightarrow Y$ (simultan)	signifikan	terbukti

Sumber : Data primer yang diolah (2010)

E. Pembahasan

1. Pengaruh pelatihan terhadap pendapatan usaha

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi log linear berganda menunjukkan pengaruh pelatihan terhadap hasil usaha memiliki nilai $t_{hitung} (|-0,142|) < t_{tabel} (1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,887 < \leq 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar $-0,012$. Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap pendapatan usaha penduduk desa Karangtalun kecamatan Tanon.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelatihan – pelatihan pada program P2MBG di desa Karangtalun belum dapat mempengaruhi pendapat usaha, hasil ini mungkin disebabkan oleh pelatihan – pelatihan yang diberikan tidak secara langsung dapat mempengaruhi hasil usaha meskipun materi yang diberikan sudah sesuai dengan usaha masing – masing penduduk yang mengikuti program.

Hasil ini kurang sesuai dengan pendapat Hidayat (1998) yang mengemukakan aspek pengembangan SDM berhubungan dengan pendidikan dan latihan/keterampilan. Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia, yang antara lain meliputi pengetahuan dan keterampilan yang akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan meningkatkan produktifitas. Hasil ini juga tidak mendukung Korompis, (2005) yang mengemukakan bahwa agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri.

Hasil ini bertentangan dengan Suseno (1995) yang telah menjelaskan secara lebih luas konsep pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat mencakup peningkatan partisipasi manusia, yaitu peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, dan perluasan berusaha. Dengan pengertian ini maka pengembangan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pengembangan, baik dalam dimensi hak maupun dimensi kewajiban. Dalam dimensi hak, maka setiap warga masyarakat mempunyai hak-hak pengembangan yang dapat dinikmati berupa kemudahan-kemudahan memperoleh fasilitas kehidupan atau yang berupa barang dan jasa yang diperoleh sebagai kontraprestasi kerja yang dilakukan; sedangkan dalam dimensi kewajiban, setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban turut serta dalam proses pengembangan.

2. Pengaruh bantuan modal terhadap pendapatan usaha

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi log linear berganda menunjukkan pengaruh pemberian modal usaha terhadap hasil usaha memiliki nilai $t_{hitung} (4,171) > t_{tabel} (\pm 1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,00 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,273. Hasil ini menunjukkan bantuan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha penduduk desa Karangtalun kecamatan Tanon. Semakin besar bantuan modal yang digunakan, semakin besar pula pendapat usaha yang didapatkan, sebaliknya semakin kecil bantuan modal semakin kecil pula pendapatan usaha yang didapatkan.

Hasil ini sesuai dengan Turang (1995) yang menyatakan bahwa bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja, ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

3. Pengaruh cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan usaha

Hasil analisis regresi log linear berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa cara-cara mengelola usaha berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pendapatan usaha penduduk desa Karangtalun kecamatan Tanon dengan nilai $t_{hitung} (2,852) > t_{tabel} (\pm 1,96)$ dan tingkat signifikansi $0,047 \leq 0,05$ dengan koefisien regresi sebesar 0,204. Hasil ini menunjukkan semakin baik cara mengelola usaha, semakin besar pula pendapat usaha yang didapatkan, sebaliknya semakin buruk cara mengelola usaha semakin kecil pula pendapatan usaha yang didapatkan.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Korompis, (2005), bahwa cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut dapat meningkatkan pendapatan usaha. Suatu usaha meskipun ada modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik, efisien dan efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami kerugian dalam berusaha.

4. Pengaruh pendidikan/pelatihan, modal usaha dan cara-cara mengolah usaha terhadap pendapatan usaha

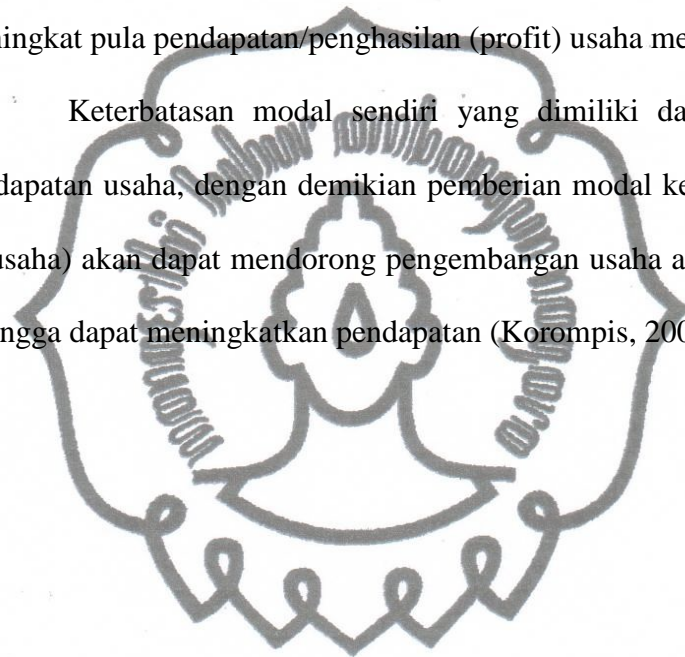
Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi log linear bergenda menunjukkan pelatihan, modal usaha dan cara-cara mengelola usaha secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan usaha penduduk desa Karangtalun kecamatan Tanon dengan nilai $F_{hitung} (7,601) > F_{tabel} (\pm 4,96)$ dan tingkat signifikansi $0,000 \leq 0,05$.

Menurut Korompis, (2005) bahwa pendidikan dan latihan serta modal usaha belum secara otomatis dapat menjamin suatu usaha mampu meningkatkan profit usahanya tanpa didukung dengan suatu cara-cara atau

manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut.

Todaro (2003) mengemukakan bahwa pengetahuan dan keterampilan memungkinkan orang untuk bekerja lebih baik. Dengan bekerja keras, seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, maka akan meningkat pula pendapatan/penghasilan (profit) usaha mereka.

Keterbatasan modal sendiri yang dimiliki dapat menghambat pendapatan usaha, dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha anggota kelompok sehingga dapat meningkatkan pendapatan (Korompis, 2005).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tata kerja P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen dengan pemberdayaan masyarakat secara terpadu, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dengan fokus utama pada peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju pada kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan dalam upaya penanganan kemiskinan
2. Pemberian pelatihan, modal usaha dan cara – cara mengolah usaha secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
3. Pemberian pelatihan berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
4. Pemberian bantuan modal usaha berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.
5. Cara-cara mengolah usaha berpengaruh terhadap pendapatan anggota P2M-BG di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

B. Saran Manajerial

Berdasarkan hasil – hasil penelitian diatas, beberapa saran manajerial yang perlu dilakukan antara lain :

1. Partisipasi masyarakat desa dapat dikembangkan dengan lebih luas, tidak terbatas sebagai pelaksana dan penerima manfaat dari program pengembangan masyarakat, tetapi diharapkan secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan peran aktif dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, terutama yang dapat memwadahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai kebijakan lembaga yang sebaiknya ditetapkan oleh pemerintahan desa.
2. Meskipun pelatihan tidak signifikan berpengaruh terhadap pendapat usaha secara parsial, akan tetapi secara simultan, pelatihan, modal usaha dan cara – cara usaha berpengaruh terhadap pendapatan usaha, dengan demikian pelatihan yang sudah ada masih perlu dilakukan dan lebih ditingkatkan lagi. Hal ini karena latihan tidak terlepas kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu unsur utama manajemen yang meliputi : kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan/mengontrol dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia
commit to user

mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri.

C. Saran Penelitian kedepan

Untuk peneliti kedepan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini antara lain:

1. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima dana P2MBG adalah perempuan. Penelitian kedepan hendaknya perlu memfokuskan pada peran perempuan dalam memanfaatkan dana P2MBG.
2. Beberapa variabel dalam penelitian ini belum dilakukan uji statistik yang lebih mendalam seperti faktor – faktor demografi. Penelitian kedepan dapat memasukkan faktor – faktor demografi sebagai variabel independen seperti umur dan pendidikan, hal ini berkaitan dengan masa produktivitas dan kemampuan memutuskan permasalahan seseorang dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I. and C.T. Morris. 1974. Who Benefit from Economic Development?. In OECD (Ed): *Planning Income Distribution, Private Foreign Investment*. OECD Development Center, Pp 49-82. Reprinted in Adelman, I. (Ed). 1995. *Dynamics and Income Distribution*. Edward Elgar Publishing Limited, Hants-England, pp 210-243.
- Adimihardja, K. dan Harry Hikmat, 2001, *Participatory Research Appraisal : Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Ahluwalia, M.S. 1974. Income Inequality. In: Chenery, H., M.S. Ahluwalia, C. L. G. Bell, H. Duloy and R. Jolly (Eds). *Redistribution with Growth*. Oxford University Press, London.
- Ahluwalia, M.S. 1976a. Income Distribution and Development: Some Stylised Facts. *The American Economic Review*. Papers and Proceedings. Vol. 66(2):128-35.
- Ahluwalia, M.S. 1976b. Inequality, Poverty and Development. *Journal of Development Economics*, No. 3:307-43.
- Aigner, D.J. and A.J. Heins. 1967. On the Determinants of Income Inequality. *The American Economic Review*. Vol. 55(1):175-84.
- Anand, S. and S.M.R. Kanbur. 1993. The Kuznets process and the Inequality-Development Relationship. *Journal of Development Economics*. Vol. 40:25-52.
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Becker, G.S. 1993. Human Capital. Dalam Henderson, D.R. (Ed.) *The Fortune Encyclopedia of Economics*. Warner Books, Inc. New York. Pp 479-483.
- Dharmawan Arya, Adiwibowo Soeryo, 2006, *Ekologi Manusia, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Fields, G.S. 1979. A Welfare Economic Approach to Growth and Distribution in the Dual Economy. *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 43(3):325-353.

commit to user

- Fields, G.S. 1987. Measuring Inequality Change in an Economy with Income Growth. *Journal of Development Economics*. Vol. 26(2):357-74.
- Friedmann, John.1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blacwell Book, Cambridge Mass
- Ghozali, Imam (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate : dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gunardi, Agung Sarwititi S, Purnaningsih Ninuk, dan Lubis Djuara P, 2006, *Pengantar Pengembangan Masyarakat*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.
- Hidayat, Komaruddin. 1998, *Masyarakat Agama dan Agenda Penegakan Masyarakat Madani*, Makalah "Seminar Nasional dan Temu Alumni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Tanggal, 25-26 September.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama. Bandung:
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Korompis, Fransiska R. 2005. *Pemberdayaan Sektor Informal : Studi tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya terhadap Penerimaan PAD di Kota Manado*.Tesis. Program Pascasarjana Iniversitas Sam ratulangi. Tidak dipublikasikan
- Korten, DC.,1990, "*Pendahuluan: Kita menghadapi masalah*" dalam *menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Terjemahan Liliam Tejasuhdana, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Korten, DC.,1990, "*Pendahuluan: Kita menghadapi masalah*" dalam *menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Terjemahan Liliam Tejasuhdana, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Moore, R.E. 1990. Measuring Inequality Change in an Economy with Income Growth. Reassessment. *Journal of Development Economics*. Vol. 32:205-10.
- Morgan, J. 1992. The Anatomy of Income Distribution. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 44 (August):279-83.

- Mubyarto. 1999. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Laporan Kaji Tindak Program IDT. Yogyakarta: Aditya Media
- Nafziger, E.W. 1990. *The Economics of developing Countries*. Second Edition. Printice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- Nurmanaf, A.R. 2004. Analisis bentuk Hubungan Antara Tingkat Pengeluaran dan Distribusinya Diantara Rumah Tangga: Kasus di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. *Buletin Ristek Balitbangda Jawa Barat*. Vol.3 No.1, Juni 2004. Halamam 12-20.
- Park, K.H. 1996. Income Inequality and Economic Progress: An Empirical Test of the Institutional Approach. *American Journal of Economics and Sociology*. January Vol. 55(1):87-97.
- Pemda Sragen. 2008. *Pedoman Pelaksanaan*. Program Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) Sragen
- Portes, Alejandro, 1998, *Social Capital : its Origin and Application in Modern Sociologi*, Annual Reviews Social, New Jersey.
- Prasetijo, Adi, 2003, *Akses Peran Serta Komuniti Lokal dan Pengeloaan Sumber Daya Alam dalam Akses perta Masyarakat*, Penerbit ICD, Jakarta.
- Prijono dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Pyatt, G. 1997. Distribution of Income and Wealth: On International Comparisons of Inequality. *The American Economic Review*. Papers and Proceedings, Vol.67(1):71- 5.
- Pp gubernur no 46 th 2007, pedoman pelaksanaan p2mbg, Propinsi Jawa Tengah
- Ram, R. 1991. Kuznets' Inverted-U Hypothesis: Evidence from a Highky Developed Country. *Southern Economic Journal*. Vol.57(4):1112-23.
- Randolph, S.M. and W.F. Lott. 1999. Can the Kuznets Effect Be Relied on the Induce Equalizing Growth?. *World Development*. Vol. 21(5):829-40.
- Robinson, S. 1976. A Note on the U-Hypothesis Relating Income Inequality and Economic Development. *The American Economic Review*. Vol. 66(3):437-40.
- Santoso, Purwo, 2002, *Merubah Watak Negara*, LAPPERA Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Soeroto, 1996, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*, Gajah MadaUniversity Press, Yagyakarta.

- Sumardjo dan Saharudin, 2006, *Tajuk Modul EP-523 : Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Sumarti Titik, dan Syaikat Yusman, 2006, *Analisis Ekonomi Lokal*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor
- Sumodiningrat, G, 1998, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta.
- Suryahadi, Asep. 2004. *Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha: Berperspektif Gender*. Dipresentasikan dalam Lokakarya Gender Mainstreaming PRSP, Jakarta 8-9 April.
- Suseno, FM. 1995. *Motivasi Manusia dalam Budaya dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Teguh, Ambar S, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga. Jakarta.
- Zainun, B. 1993. *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.